

PERLINDUNGAN HUKUM WANPRESTASI PEMOTONGAN GAJI TERLALU BESAR OLEH P3MI TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Irma Abidahsari

ABSTRAK

Menjadi sebuah urgensi yang mana menduduki posisi terdepan atas pemberian perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam perbuatan wanprestasi pihak lain. Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana bentuk wanprestasi pemotongan gaji terlalu besar oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT X kepada Pekerja Migran Indonesia serta mengetahui bentuk perlindungan hukum pekerja migran Indonesia akibat wanprestasi pemotongan gaji terlalu besar oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT X. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian didapat bahwa bentuk wanprestasi pemotongan gaji terlalu besar oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia PT X kepada pekerja migran Indonesia adalah melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan dengan mana adanya unsur kesengajaan atas biaya tiket dan paspor yang tetap masuk kedalam bagian pemotongan gaji. Bentuk Perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia akibat wanprestasi pemotongan gaji terlalu besar oleh Pihak Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT X meliputi preventif melalui regulasi dalam Pasal 1246 KUH Perdata dan undang-undang terkait lainnya serta represif sewaktu kasus telah terjadi melalui jalan mediasi dan/atau musyawarah mufakat, dengan berpijak kepada Teori Perlindungan Hukum, Teori Sistem Hukum oleh Lawrence Meir Friedman yakni Struktur, Substansi dan Budaya Hukum, serta Teori Asas Itikad Baik. BP3MI DKI Jakarta selaku struktur hukum, bertindak sebagai petugas mediator yang berperan penting sebagai penengah dan menyelesaikan apa yang menjadi kehendak kedua pihak atas persetujuan bersama, dengan kesepakatan akhir berupa pemberian ganti rugi kepada Pekerja Migran Indonesia yang dirugikan sebesar sepuluh juta rupiah.

Kata Kunci: Wanprestasi, Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hukum

LEGAL PROTECTION OF DEFAULT IN DEDUCTING TOO MUCH SALARY BY P3MI AGAINST INDONESIAN MIGRANT WORKERS

Irma Abidahsari

ABSTRACT

It becomes an urgency which occupies a leading position on the provision of legal protection for the injured party in the default of the other party. The purpose of the research is to find out how the form of default of the Indonesian migrant worker placement company PT X to Indonesian migrant workers and to find out the form of legal protection of Indonesian migrant workers due to default of the Indonesian Migrant Worker Placement Company PT X. By using normative legal research methods through a statutory approach and case approach. The results of the study found that the form of default of the Indonesian migrant worker placement company PT X to Indonesian migrant workers is doing what was promised but not as promised. Where, P3MI PT X has the obligation to carry out salary deductions as a form of reimbursement of placement costs from borrowing money by Mrs. S, but the act of deducting the salary turns out to be more than what should be stated in the agreement "Statement of Costs and Salaries." As well as, the form of legal protection for Indonesian migrant workers due to the default of the Indonesian Migrant Worker Placement Company PT X includes preventive through regulations in Article 1246 of the Civil Code and other related laws and repressive when the case has occurred through mediation and / or consensus deliberation, based on the Legal System Theory by Lawrence Meir Friedman, namely Structure, Substance and Legal Culture. BP3MI DKI Jakarta as a legal structure, acts as a mediator officer who plays an important role as an arbiter and resolves what is the will of the two parties by mutual consent, with the final agreement in the form of compensation to the aggrieved Indonesian Migrant Worker in the amount of ten million rupiah.

Keywords : *Failure to Perform, Indonesian Migrant Worker, Legal Protection*